



PUSAT KONFERENSI INTERNASIONAL BFA

Foto drone udara yang diambil pada 17 Maret 2024 menunjukkan Pusat Konferensi Internasional Boao Forum for Asia (BFA) dan hotel setelah renovasi di zona demonstrasi hampir nol karbon Boao di Boao, Provinsi Hainan, Tiongkok selatan. Zona demonstrasi karbon mendekati nol di Boao dioperasikan pada hari Senin. Pengoperasian dan pengelolaan zona tersebut dilakukan dengan cara yang cerdas untuk mencapai emisi karbon mendekati nol di tingkat regional.

Lebih dari 200.000 Warga Terancam Kelaparan, Gaza Butuh Gencatan Senjata Segera

Lebih dari 200.000 warga Palestina di Gaza akan mengalami kelaparan antara pertengahan Maret hingga Mei 2024.

GAZA(IM)-Laporan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) menunjukkan bahwa lebih dari 200.000 warga Palestina di Gaza akan mengalami kelaparan antara pertengahan Maret hingga Mei 2024. IPC memperingatkan gencatan senjata mesti diberlakukan untuk menghindari kelaparan di utara Jalur Gaza.

IPC sendiri mengklasifikasikan kelaparan sebagai tingkat kerawanan pangan terparah. Kelaparan dideskripsikan terjadi jika setidaknya 20 persen rumah tangga

kekurangan kebutuhan dasar dan malnutrisi akut melebihi 30 persen.

Usai diterbitkannya laporan tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak gencatan senjata segera. Guterres mengingatkan bahwa kelaparan di Gaza adalah buatan manusia. "Kelaparan di depan mata di utara Gaza adalah bencana yang sepenuhnya dibuat manusia," kata Guterres melalui media sosial X, Selasa (19/3).

"Saya kembali menyerukan gencatan senjata hu-

maniter segera. Kita harus bertindak sekarang untuk mencegah hal yang tidak terduga, tidak bisa diterima, dan tidak bisa dibenarkan."

Sementara itu, pelapor khusus PBB tentang hak atas pangan, Michael Fakri menyebut Amerika Serikat (AS) terlibat menciptakan kelaparan di Jalur Gaza. Fakri mendesak pemerintahan Joe Biden bertindak lebih jauh mengintervensi sekutunya.

"Jika AS sangat serius mencegah kelaparan, mereka bisa menekan Israel untuk gencatan senjata, mereka akan berhenti memasok senjata dan dukungan finansial ke Israel," kata Fakri dikutip Al Jazeera.

Blokade total Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu membuat masyarakat Gaza kekurangan pangan dan air bersih di tengah operasi

militer. Masyarakat di utara Gaza dilaporkan terpaksa mengonsumi makanan hewan atau mengais-ngais untuk mencari makanan.

Sebanyak 27 anak telah tewas belakangan ini karena malnutrisi di utara Gaza. Korban kelaparan kemungkinan bertambah jika gencatan senjata tidak segera diberlakukan.

Menurut data terkini Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, serangannya Israel telah membunuh setidaknya 31.726 orang di enklave tersebut. Lebih dari setengah korban serangan Israel adalah anak-anak dan perempuan.

Sedangkan sedikitnya 73.792 orang terluka akibat serangan Israel. Lebih dari 8.000 orang dinyatakan hilang, kemungkinan tertimbun reruntuhan.

Sementara itu, Kepala kantor koordinasi bantuan kemanusiaan PBB (OCHA) Martin Griffiths mengecam kegagalan masyarakat internasional mencegah kelaparan "yang akan segera" terjadi di Gaza. Lembaga amal asal Inggris, Oxfam mengatakan kelaparan itu sengaja diciptakan Israel.

"Lebih dari satu juta orang beresiko karena mereka terputus dari bantuan yang dapat menyelamatkan nyawa, pasar-pasar ambruk dan ladang hancur," kata Griffiths di media sosial X seperti dikutip dari Aljazeera, Senin (18/3).

Griffiths mengatakan dunia harus "membangiri" Gaza dengan makanan dan bantuan. "Tidak ada waktu untuk disia-siakan," katanya. ● tom

Syarat Warga Korea Selatan Lepas dari Wajib Militer

SEOUL(IM)-Korea Selatan mewajibkan warga negaranya yang berjenis kelamin laki-laki untuk melaksanakan wajib militer. Kriteria tersebut mencakup semua laki-laki dengan kondisi sehat dan berusia 18-28 tahun. Peserta wajib militer di Korea Selatan akan mengikuti banyak kegiatan, seperti pelatihan dasar, pelatihan fisik mulai dari push up, baris-berbaris, dan menembak.

Sementara itu, durasi wajib militer berbeda-beda tergantung kelompok militer dan jenis tugas yang didapat, aktif maupun non aktif. Adapun masa dinas Angkatan Darat dan Marinir Korea Selatan berdurasi 21 bulan, Angkatan Laut 23 bulan, dan Angkatan Udara 24 bulan.

Masa dinas berdasarkan tugas aktif, yakni 24 bulan dengan jenis pekerja sosial atau kerja sama internasional, 34 bulan bagi tenaga teknik industri, dan 36 bulan bagi tugas dokter, pengacara, dokter hewan, dan peneliti ahli.

Saat melakukan pemeriksaan, dokter khusus wamil ataupun perwira medis memberi rating kelayakan orang tersebut untuk menjalani dinas militer. Rating ini terdiri dari 7 level, semakin kecil angka level menunjukkan kebutuhan pertahanan dan kebijakan negara, sebagaimana diinformasikan dalam laporan yang sama.

Penolakan terhadap wajib militer tidak diperbolehkan dan bisa dikenakan hukuman penjara. Bagi mereka yang menolak wamil akan menjadi buronan, dan jika tertangkap bisa dijatuhi hukuman penjara. Selain itu juga, bagi warga negara Korea Selatan yang menolak wajib militer akan mendapatkan sanksi masyarakat berupa ujaran kebencian. Namun, bagi mereka yang menyerahkan diri akan didenda bebas syarat dan mengikuti wamil.

● tom

level 6. Mereka yang berada di level 7, ialah orang-orang yang sulit diperiksa karena ada penyakit maupun gangguan fisik maupun mental. Direktur urusan militer daerah harus memberikan pemeriksaan kembali pada orang yang mendapat rating level 7.

Korea Economic Institute of America mengungkapkan bahwa ada syarat pengecualian bagi warga Korea Selatan yang bisa bebas dari kewajiban wamil. Seperti laki-laki dengan gangguan fisik atau mental, ilmuwan, kriminal, pencari nafkah, atau anak laki-laki tunggal dalam keluarga. Selain itu, atlet yang berhasil meraih medali Olimpiade atau medali emas di Asian Games juga mendapatkan keistimewaan dari kewajiban militer.

Sebelumnya, sistem Wamil di Korea Selatan memungkinkan laki-laki untuk menunda kewajiban militernya hingga mencapai usia 30 tahun. Namun, ada perubahan signifikan yang diberlakukan melalui perubahan Undang-Undang Pendaftaran Wamil pada tanggal 1 Agustus 2018.

Perubahan ini mengurangi batas usia penundaan Wamil menjadi 28 tahun. Seiring dengan evolusi kebutuhan pertahanan dan kebijakan negara, sebagaimana diinformasikan dalam laporan yang sama.

Penolakan terhadap wajib militer tidak diperbolehkan dan bisa dikenakan hukuman penjara. Bagi mereka yang menolak wamil akan menjadi buronan, dan jika tertangkap bisa dijatuhi hukuman penjara. Selain itu juga, bagi warga negara Korea Selatan yang menolak wajib militer akan mendapatkan sanksi masyarakat berupa ujaran kebencian. Namun, bagi mereka yang menyerahkan diri akan didenda bebas syarat dan mengikuti wamil.

Kim Jong Un Luncurkan Uji Coba Roket Ganda Super Besar

PYONGYANG(IM)-Uji coba peluncuran roket ganda super besar berkecapaian nuklir dihadiri langsung oleh pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. Foto-foto yang dirilis Kantor Berita Resmi Korea, KCNA pada Selasa (19/3) menunjukkan sebanyak enam roket telah ditembakkan dengan api serta asap menyelimuti kendaraan peluncur itu.

Kim menyebut latihan itu melibatkan peluncur roket ganda 600mm dan menggambarannya sebagai bagian penting dari kemampuan militer Pyongyang untuk menghancurkan ibu kota Korea Selatan, Seoul, jika perang terjadi di Semenanjung Korea.

"(Kim) mengatakan bahwa perlu untuk lebih menekankan kepada musuh-musuhnya bahwa jika terjadi konflik bersenjata dan perang, mereka tidak akan pernah bisa meng-

hindari konsekuensi bencana," tulis KCNA.

Pemimpin seumur hidup Korea Utara itu mendesak agar pihak militer mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi ancaman perang.

Peluncuran rudal Korea Utara terjadi beberapa hari setelah berakhirnya latihan militer gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat yang terbaru yang digambarkan oleh Korea Utara sebagai latihan invasi.

Laporan KCNA muncul sehari setelah militer Korea Selatan dan Jepang mengatakan mereka mendeteksi tembakan rudal balistik jarak pendek Korea Utara ke perairan lepas pantai timur.

Para ahli mengatakan roket artileri berukuran besar milik Korea Utara sulit diidentifikasi sebagai sistem artileri dan rudal balistik karena mereka dapat menciptakan daya dorong

sendiri dan dikendalikan selama peluncuran.

Ketegangan di Semenanjung Korea telah meningkat sejak tahun 2022, setelah Kim menggunakan invasi Rusia ke Ukraina sebagai gangguan untuk mempercepat pengujian rudal dan senjata lainnya.

Amerika Serikat dan Korea Selatan telah meresponsnya dengan memperluas pelatihan gabungan dan latihan trilateral yang melibatkan Jepang dan memperbarui strategi pencegahan yang dibangun berdasarkan aset-aset strategis AS.

Ada kekhawatiran bahwa Korea Utara akan semakin meningkatkan tekanan pada tahun pemilu di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dalam pidatonya yang berapi-api di parlemen Pyongyang pada bulan Januari, Kim mengabaikan rekonsiliasi Korea dan menobatkan Seoul sebagai musuh utama.

● ans



PENGHARGAAN PANDUAN MICHELIN

Koki Prancis Fabien Ferre (atas, kiri) dan Jerome Banctel (atas, kanan) merayakan setelah dianugerahi bintang Michelin ketiga pada upacara penghargaan Panduan Michelin untuk Prancis 2024 di Tours, Prancis, Senin (18/3). Panduan Michelin diluncurkan pada tahun 2024 Edisi Prancis pada hari Senin di Tours.

Kemenangan Putin Disambut Sinis Pemimpin Uni Eropa

ANKARA (IM)- Sejumlah negara Eropa pada Senin (18/3) mengecam pelaksanaan pemilihan presiden Rusia di daerah Ukraina yang diduduki negara tersebut sebagai bentuk tindakan pelanggaran kedaulatan.

"Prancis mengecam Rusia yang melaksanakan apa yang mereka sebut 'pemilu' di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, yakni Republik Otonom Krimea, Kota Sevastopol, dan juga sebagian daerah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis.

Krimea dan Sevastopol diduduki Rusia sejak 2014, dan empat kawasan Ukraina lainnya dicaplok Rusia secara ilegal pada September 2022 setelah negara tersebut melancarkan serangannya ke Ukraina pada Februari di tahun yang sama. Sebagian besar anggota-anggota komunitas internasional tidak mengakui aneksasi ilegal tersebut. "Pelaksanaan ilegal 'pemilu' di daerah Ukraina yang diduduki Rusia tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam PBB," ucap Kemlu Prancis.

Prancis menegaskan tidak akan mengakui baik pelaksanaan pemilu tersebut maupun hasilnya. Selain itu, Prancis juga mengecam kurangnya demokrasi dan keberagaman calon presiden, serta keengganan Rusia mendukung pengamat asing dalam pilpresnya.

"Calon-calon yang menentang keberlanjutan perang di Ukraina tidak diizinkan ikut serta dalam pemilu sehingga mengurangi tingkat pluralisme (calon)," demikian Kemlu Prancis.

Senada, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengecam pelaksanaan pilpres Rusia di daerah Ukraina yang didu-

di, sebagai pelanggaran kedaulatan Ukraina yang bertentangan dengan Piagam PBB. Cameron juga mengecam pengekanan yang terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin yang berupaya "membungkam oposisi terhadap perang di Ukraina yang ilegal".

Ia turut mengkritik kurangnya keberagaman calon di pilpres tersebut karena hanya diikuti oleh tiga calon lain selain Putin. Jerman juga mengkritik pilpres Rusia dan menyebut pemilu tersebut pada dasarnya "tidak bebas maupun adil".

Juru bicara pemerintah Jerman Christiane Hoffmann mengatakan, Kanselir Olaf Scholz tidak akan menyampaikan ucapan selamat kepada Putin yang memenangi pemilu itu. "Kami menganggap apa yang disebut 'pemilu' di Rusia yang digelar pekan lalu tidak bebas serta tidak adil," ucap Hoffmann.

Ia mengatakan, pemilu tersebut tidak demokratis karena tidak ada calon yang dinilai benar-benar mewakili pihak oposisi. Juru bicara juga mengatakan pihaknya mengecam pelaksanaan pilpres Rusia di daerah Ukraina yang diduduki negara itu. "Tentu saja kami tidak akan mengakui hasilnya karena hanya Ukraina yang berhak mengadakan pemilu di daerah tersebut," tutur Hoffmann.

"Demikianlah pandangan kami terkait apa yang disebut pemilu itu, dan karena itulah kanselir tidak akan mengucapkan selamat kepada Putin," tambahnya.

Vladimir Putin dipastikan terpilih kembali sebagai Presiden Rusia setelah mendapat 87,32 persen suara dari 99,75 persen surat suara yang sudah dihitung penyelenggara pemilu Rusia. ● ans

Maroko Bantah Sita Aset Kedutaan Besar Aljazair di Rabat

MAROKO(IM)-Tuduhan pemerintah Aljazair tentang penyitaan aset kedutaan besar mereka di Rabat, dibantah dengan tegas oleh Kerajaan Maroko.

Dalam sebuah pernyataan yang diterima redaksi pada Selasa (19/3), Maroko menyebut klaim pernyataan yang dituduhkan Aljazair tidak sesuai dengan fakta.

Dijelaskan bahwa kantor Kanselir dan Kediaman bekas Kedutaan Besar Aljazair di Rabat yang tanahnya disumbangkan oleh pihak berwenang Maroko, hingga kini belum disita meskipun hubungan diplomatik mereka sudah berakhir sejak 2021 lalu.

"Tempat-tempat ini tetap dihormati dan dilindungi oleh otoritas Maroko, bahkan ketika tidak ada hak istimewa setelah pemutusan hubungan diplomatik secara sepihak oleh Aljazair," tegas Maroko.

Adapun yang masih dalam proses diskusi adalah bangunan tak terpakai milik Aljazair yang berdekatan dengan kantor pusat Kementerian Luar Negeri.

Dikatakan sejak Januari 2022, pemerintah Maroko sudah beberapa kali memberi tahu pihak berwenang Aljazair tentang keinginan mereka mengakuisisi lokasi tersebut untuk memperluas gedung Kemlu.

"Pihak berwenang Aljazair telah terlibat erat, selama lebih dari dua tahun, dan mendapat informasi yang sepenuhnya transparan," ungkap Maroko.

Selain Al-Jazair, perluasan gedung Kemlu Maroko juga melibatkan beberapa tanah kedutaan lain, terutama di Pantai Gading dan Swiss. Pihak Aljazair disebut telah menanggapi tawaran Maroko dan sedang melakukan penilaian terhadap aset-aset yang hendak diakuisisi Rabat.

Meskipun Aljazair memutuskan hubungan secara sepihak pada 24 Agustus 2021, Maroko tetap memikul tanggung jawab dan mematuhi tugasnya berdasarkan aturan dan kebiasaan diplomasi.

Oleh karena itu, Kerajaan Maroko selalu berupaya menjaga hubungan bertetangga yang baik antara kedua negara dan persaudaraan antara kedua bangsa dan tidak pernah melakukan eskalasi atau provokasi. ● tom